

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan daerah* (Edisi 2). Jakarta: Penerbit Indeks.
- Kesumadewi, Diah Ayu,& Arief Rahman. (2007). *Flypaper effect pada dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia*.JAAI,vol. 11(1), 67-80. Yogyakarta.
- Nafarin. (2008), *Penganggaran Perusahaan*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Sarjana, I Made, Luh Mei Wahyuni, dan I Made Syra Ambarajaya. (2012), “Pengaruh Anggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial Pada PT (PERSERO) Angkasa Pura I Bandar Udara Ngurah Rai-Bali”. Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.8 No.1 Maret 2012.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 Tentang Klasifikasi Anggaran*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Peraturan Walikota Blitar. (2014). *Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja BPKAD Kota Blitar*. Blitar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.